

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mengukur kemajuan dan berkembangnya suatu bangsa, karena pendidikan merupakan sebuah usaha untuk menciptakan manusia seutuhnya yang mampu menciptakan peradaban yang berkembang juga mampu berinovasi dengan mengembangkan potensi dalam dirinya. Secara teoritik pendidikan dijabarkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 pasal satu yang berbunyi:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Dari pasal tersebut tersirat bahwa pendidikan merupakan sebuah usaha yang dilakukan secara sadar untuk mengembangkan potensi manusia sehingga dapat membuat kemajuan bagi suatu bangsa. Pendidikan harus mampu menciptakan manusia-manusia yang berkompetensi yang mampu bersaing secara nasional maupun global.

Sejak tahun 1999 Indonesia telah menggulirkan Undang-undang tentang Otonomi daerah atau desentralisasi dan diberlakukan sejak per 1 Januari 2001 membawa implikasi yang begitu besar bagi bidang pendidikan. Desentralisasi pendidikan di tingkat satuan pendidikan (sekolah) merupakan satu bentuk desentralisasi yang menuntut otonomi sekolah, bahkan beberapa urusan yang secara langsung di serahkan kepada sekolah sebagai perwujudan dari otonomi sekolah. Menurut Sri Minarti (2011: 12) ada beberapa hal yang diserahkan langsung kepada sekolah, yaitu *Pertama*, menetapkan visi, misi, strategi, tujuan, logo, lagu, dan tata tertib sekolah. Urusan ini menjadi penting karena merupakan modal awal yang harus dimiliki sehingga seyogyanya

sekolah dapat menyusun dan menetapkannya sendiri. *Kedua*, memiliki kewenangan dalam penerimaan siswa baru sesuai dengan ruang kelas yang tersedia, fasilitas yang dimiliki dan jumlah guru serta staf yang dimiliki. Berdasarkan sumber daya pendukung yang dimilikinya sekolah secara bertanggung jawab harus dapat menentukan jumlah siswa yang diterima, syarat siswa yang akan diterima, dan syarat lain yang terkait dengan mempertimbangkan beberapa ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Ketiga menetapkan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang diadakan dan dilaksanakan oleh sekolah. Sekolah diberikan kewenangan untuk dapat melaksanakan kurikulum nasional dengan kemungkinan mengurangi atau menambah muatan kurikulum. *Empat*, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan termasuk buku pelajaran yang diberikan sekolah dengan memperhatikan standar dan ketentuan yang ada. *Kelima* penghapusan barang dan jasa yang dilakukan dengan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan. *Keenam*, proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah yang menjadi kewenangan profesional yang dimiliki oleh lembaga pendidikan. Kepala sekolah dan guru harus dapat merancang proses pengajaran dan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik dapat belajar dengan lancar dan berhasil. *Ketujuh*, perwujudan otonomi daerah mengerucut pada kewenangan sekolah dalam mengatur diri karena itu manajemen sekolah menjadi bagian integral dari proses pengelolaan sekolah dalam mewujudkan tujuan pendidikan dengan bingkai otonomi pendidikan secara keseluruhan.

Salah satu model manajemen otonomi sekolah adalah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang merupakan model pengelolaan yang memberikan otonomi atau kemandirian kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota.

Herlina, 2013

Kontribusi Kemampuan Supervisi Kepala Sekolah terhadap Kinerja Mengajar Guru di SMP Negeri se-Kabupaten Purwakarta

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Sekolah diwajibkan untuk menerapkan manajemen berbasis sekolah seperti tertuang dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003 pasal 51 ayat 1 yang berbunyi: “Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah”. Dari peraturan tersebut jelas bahwa sekolah harus menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah yang transparan, akuntabel dan partisipatif serta inovatif. Manajemen berbasis sekolah adalah sebuah konsep otonomi sekolah, yang menurut Mulyasa (2002), Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi, dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerja sama yang erat antara sekolah masyarakat dan pemerintah.

Sekolah menengah pertama (disingkat SMP, Bahasa Inggris: *junior high school*) adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus sekolah dasar (atau sederajat). SMP berlaku sebagai jembatan antara sekolah dasar dengan sekolah menengah atas. Lulusan sekolah menengah pertama dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan (atau sederajat). Pelajar sekolah menengah pertama umumnya berusia 13-15 tahun. Di Indonesia, setiap warga negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, yakni sekolah dasar (atau sederajat) 6 tahun dan sekolah menengah pertama (atau sederajat) 3 tahun. Sekolah menengah Pertama merupakan salah satu dari bentuk pendidikan dasar yang berarti proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan.

Sekolah Menengah Pertama termasuk ke dalam pendidikan dasar yang menjadi batu loncatan untuk siswa menemukan jati diri dan menambah bekal untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, sekolah menengah

Herlina, 2013

Kontribusi Kemampuan Supervisi Kepala Sekolah terhadap Kinerja Mengajar Guru di SMP Negeri se-Kabupaten Purwakarta

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

pertama merupakan tempat pembentukan siswa untuk menjadi warga negara yang baik dan mulai memperkenalkan menjadi bagian dari masyarakat. Sekolah menengah pertama menjadi salah satu kunci dari ketercapaian keberhasilan pendidikan karena di sekolah menengah pertama karakter di sekolah dasar dikembangkan dan diperdalam dengan aplikasi.

Melihat pada pengertian MBS dan pentingnya sekolah menengah pertama diatas, maka dibutuhkan seorang pemimpin yang inovatif di sekolah, kunci keberhasilan MBS adalah kepala sekolah yang mampu memberdayakan dan menjalin kerja sama dengan masyarakat sekitar sekolah. Kepala sekolah dalam Peraturan Menteri No 28 tahun 2010 menyatakan bahwa:

“Kepala sekolah/madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin taman kanak-kanak/raudhotul athfal (TK/RA), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK), atau sekolah menengah atas luar biasa (SMALB) yang bukan sekolah bertaraf internasional (SBI) atau yang tidak dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional (SBI)”.

Dari pengertian diatas, kepala sekolah merupakan guru yang diberi tugas tambahan sehingga secara operasional tetap menjalankan tugas sebagai pendidik dan tugas memimpin sekolah menuju arah yang lebih baik. Setiap kepala sekolah dalam menjalankan tugas dan fungsinya diharapkan memiliki banyak kemampuan mulai dari kemampuan memimpin, kemampuan melakukan supervisi, kemampuan manajerial sampai pada kemampuan kewirausahaan.

Guru memiliki kesempatan yang besar untuk ditingkatkan kinerjanya oleh kepala sekolah dibandingkan dengan pegawai yang lain karena guru sebagai pendidik adalah tokoh yang paling banyak bergaul dan berinteraksi dengan para peserta didik di bandingkan dengan personel lainnya di sekolah.

Dengan peran sentralnya seorang guru, tugasnya disekolah bukan hanya
Herlina, 2013

Kontribusi Kemampuan Supervisi Kepala Sekolah terhadap Kinerja Mengajar Guru di SMP Negeri se-Kabupaten Purwakarta

mengajar melainkan banyak hal, baik yang terkait dengan kedinasan dan profesinya di sekolah. Seperti mengajar dan membimbing para muridnya, memberikan penilaian belajar peserta didiknya, mempersiapkan administrasi pembelajaran yang diperlukan, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pembelajaran.

Tetapi, dengan banyaknya tugas seorang guru dan pentingnya keberadaan seorang guru, menurut Syaiful Sagala (2009: 11) profesi guru masih dihadapkan pada banyak permasalahan salah satunya adalah sejalan dengan UU No. 14 tahun 2005 pasal 8 yang menyatakan guru wajib memiliki kualifikasi, akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kemudian pasal 9 menyatakan kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.

Selain permasalahan diatas yang dihadapi oleh guru, saat ini banyak guru yang merasa ditinggalkan atau diabaikan oleh murid-muridnya karena berbagai hal (syaiful sagala, 2009: 15), salah satunya adalah guru kurang memahami dan mengerti peralatan dan perlengkapan yang sangat diperlukan dalam suatu penyampaian bahan pelajaran dan sumber belajar yang terbatas. Padahal, menurut Abdul Majid (2007:4) keberhasilan pendidikan terutama implementasi kurikulum sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru, tidak jarang kegagalan implementasi kurikulum disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, keterampilan dan kemampuan guru dalam memahami tugas-tugas yang harus dilaksanakannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan dan implementasi kurikulum terletak pada bagaimana pelaksanaannya disekolah, khususnya di kelas dalam kegiatan pembelajaran yang merupakan kunci keberhasilan tersebut.

Fenomena yang kita lihat di banyak sekolah bahwa kepala sekolah sibuk dengan urusan administrasi dan pembangunan, sehingga terkadang melupakan salah satu tugas pokoknya sebagai seorang supervisor. Kesibukan

Hertina, 2013

Kontribusi Kemampuan Supervisi Kepala Sekolah terhadap Kinerja Mengajar Guru di SMP Negeri se-Kabupaten Purwakarta

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

kepala sekolah dalam urusan administrasi umpamanya, menyebabkan ia bingung akan mendahulukan tugas yang mana sehingga ia lebih banyak duduk di belakang meja. Kesibukan lain yang biasanya dilakukan oleh kepala sekolah adalah membuat usulan penambahan ruang belajar, kegiatan MGMP, rapat kepala-kepala sekolah, dan masih banyak lagi hal lainnya sehingga tidak semua guru mendapatkan kesempatan untuk disupervisi. Kesibukan kepala sekolah juga menyebabkan interaksi guru dan kepala sekolah menjadi tidak intensif sehingga pelaksanaan supervisi dalam meningkatkan kinerja mengajar guru dirasakan guru. Hal ini dipertegas oleh Bpk. Asep Mulyana kepala sekolah SMP Negeri 2 Kiarapedes yang diwawancarai penulis, bahwa kepala sekolah terlalu sibuk diluar mengurus banyak hal yang seperti rapat kepala sekolah, rapat biaya operasional sekolah, dan masalah administratif lain sehingga pembinaan dari kepala sekolah kepada guru-guru kurang yang mengakibatkan dalam satu tahun kepala sekolah hanya dapat mensupervisi 1-2 guru.

Permasalahan-permasalahan diatas mengindikasi bahwa kemampuan supervisi kepala sekolah kurang dalam melakukan pembinaan guna meningkatkan kinerja mengajar guru. Sehingga penulis mengambil kesimpulan bahwa masalah yang terjadi akibat dari banyaknya tugas pokok kepala sekolah yang selain harus melaksanakan tugas sebagai seorang pendidik juga harus memahami dan menguasai delapan standar ditambah juga dengan tugas sebagai seorang pemimpin yang harus mengelola sekolah.

Kinerja mengajar sendiri diambil dari dua suku kata yaitu kinerja yang menurut A.A Anwar Prabu (2009:9) adalah “hasil kerja secara kuantitas dan kualitas yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”, sedangkan mengajar menurut Burtn (Dalam Solihin, 2007:25) secara sederhana diartikan sebagai suatu kegiatan membimbing aktivitas belajar. Sehingga kinerja mengajar merupakan hasil kerja yang dicapai oleh guru dalam membimbing anak dalam aktivitas belajar.

Herlina, 2013

Kontribusi Kemampuan Supervisi Kepala Sekolah terhadap Kinerja Mengajar Guru di SMP Negeri se-Kabupaten Purwakarta

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Kinerja mengajar guru dipengaruhi oleh berbagai hal, salah satunya adalah kepemimpinan kepala sekolah sebagai seorang manajer yang harus dapat memantau keberlangsungan proses belajar dan pembelajaran di sekolah. Seperti dikatakan oleh Mulyasa (2012: 82) kepala sekolah diharapkan dapat membimbing dan mengarahkan pengembangan kurikulum dan program pembelajaran serta melakukan pengawasan pelaksanaannya. Kepala sekolah sebagai seorang supervisor di sekolah harus bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan dan penilaian program pembelajaran di sekolah.

Supervisi sendiri menurut Kimbal Willes (1961:8) dalam Dadang Suhardan (2010: 38) menyatakan bahwa supervisi pendidikan merupakan usaha untuk membantu menciptakan situasi belajar mengajar ke arah yang lebih baik. Tujuan konkret dari supervisi pendidikan menurut Piet A Sihertian dan Frans Mataheru (1981: 24) adalah:

1. Membantu guru-guru melihat dengan jelas tujuan-tujuan pendidikan
2. Membantu guru-guru dalam membimbing pengalaman belajar mengajar murid-murid
3. Membantu guru-guru dalam menggunakan sumber-sumber pengalaman belajar
4. Membantu guru-guru dalam menggunakan metode dan alat pelajaran modern
5. Memnatu guruguru dalam memenuhi kebutuhan belajar murid-murid
6. Membantu guru-guru dalam hal menilai kemajuan murid dan hasil pekerjaan guru itu sendiri
7. Membantu guru-guru dalam membina reaksi mental atau moral kerja guru-guru dalam rangka pertumbuhan pribadi dan jabatan mereka
8. Membantu guru-guru baru di sekolah sehingga mereka merasa gembira dengan tugas yang diperolehnya
9. Membantu guru-guru agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap masyarakat dan cara-cara menggunakan sumber-sumber masyarakat dan seterusnya

Hertina, 2013

Kontribusi Kemampuan Supervisi Kepala Sekolah terhadap Kinerja Mengajar Guru di SMP Negeri se-Kabupaten Purwakarta

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

10. Membantu guru-guru agar waktu dan tenaga guru tercurahkan sepenuhnya dalam pembinaan sekolah.

Kepala sekolah dalam kedudukannya sebagai seorang supervisor berkewajiban membina guru-guru agar menjadi pendidik dan pengajar yang baik. Bagi guru yang sudah baik agar dapat dipertahankan kualitasnya dan bagi guru yang belum baik dapat dikembangkan menjadi lebih baik. Sementara itu, semua guru baik yang sudah kompeten maupun yang masih lemah harus diupayakan agar tidak ketinggalan dalam proses pembelajaran maupun materi yang diajarkan (Made Pidarta, 2009:18).

Kepala sekolah sebagai seorang supervisor adalah memantau dan mengawasi ruang lingkup semua penilaian yang disiapkan oleh guru. Kemudian kepala sekolah menjamin bahwa semua penilaian dilakukan berdasarkan teori sehingga ada jaminan yang tinggi bahwa evaluasi hasil belajar yang dilakukan oleh guru mempunyai tingkat objektivitas yang tinggi (Sagala, 2010:137). Untuk mengatasi berbagai kesulitan guru dalam melaksanakan program pengajaran sebagai upaya melakukan perbaikan terus menerus, maka kepala sekolah sebagai supervisor memberi bimbingan baik dalam bentuk bimbingan langsung, *on the job training*, maupun workshop (Sagala, 2010:135).

Kepala sekolah sebagai supervisor harus diwujudkan dalam kemampuan menyusun, melaksanakan program supervisi pendidikan, serta memanfaatkan hasilnya. Kemampuan menyusun program supervisi pendidikan harus diwujudkan dalam penyusunan program supervisi kelas pengembangan program supervisi untuk kegiatan ekstra kurikuler, pengembangan program supervisi perpustakaan, laboratorium, dan ujian. Kemampuan melaksanakan program supervisi pendidikan harus diwujudkan dalam pelaksanaan program supervisi klinis, program supervisi nonklinis, dan program supervisi kegiatan ekstra kurikuler. Sedangkan kemampuan memanfaatkan hasil supervisi pendidikan harus diwujudkan dalam

Herlina, 2013

Kontribusi Kemampuan Supervisi Kepala Sekolah terhadap Kinerja Mengajar Guru di SMP Negeri se-Kabupaten Purwakarta

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

pemanfaatan hasil supervisi untuk meningkatkan kinerja tenaga kependidikan dan pemanfaatan hasil supervisi untuk mengembangkan sekolah.

Wahyuni pada tahun 2012 dalam skripsinya yang berjudul “kontribusi peranan kepala sekolah sebagai supervisor dalam meningkatkan kinerja mengajar guru pada SD Negeri di Kecamatan Jintinyuat Kabupaten Indramayu” menyimpulkan bahwa adanya kontribusi yang positif antara peran kepala sekolah sebagai supervisor dalam meningkatkan kinerja mengajar guru pada SD Negeri di Kecamatan Jintinyuat Kabupaten Indramayu.

Kegiatan supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah akan berpengaruh terhadap kinerja mengajar guru, guru yang mendapatkan supervisi baik berupa pembinaan, pembimbingan oleh kepala sekolah akan bekerja dengan baik yang mengakibatkan produktivitasnya meningkat tetapi jika guru merasa tidak diperhatikan dengan tidak adanya kegiatan supervisi dari kepala sekolah maka guru akan mengalami kesulitan dalam melakukan tugasnya sehingga produktivitasnya menurun.

Melihat pada peliknya permasalahan dan saling ketergantungannya kepala sekolah dan guru yang menjadi dua komponen yang saling berkaitan penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai “Kontribusi Kemampuan Supervisi Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Mengajar Guru di SMP Negeri se-Kabupaten Purwakarta”.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Permasalahan yang muncul dilapangan setelah diidentifikasi bahwa kepala sekolah sibuk dengan urusan administrasi dan pembangunan, sehingga terkadang melupakan salah satu tugas pokoknya sebagai seorang supervisor. Kesibukan kepala sekolah dalam urusan administrasi umpamanya, menyebabkan ia bingung akan mendahulukan tugas yang mana sehingga ia lebih banyak duduk di belakang meja. Kesibukan lain yang biasanya dilakukan oleh kepala sekolah adalah membuat usulan penambahan ruang belajar, kegiatan MGMP, rapat kepala-kepala sekolah, dan masih banyak lagi hal lainnya sehingga tidak semua guru mendapatkan kesempatan untuk

Herlina, 2013

Kontribusi Kemampuan Supervisi Kepala Sekolah terhadap Kinerja Mengajar Guru di SMP Negeri se-Kabupaten Purwakarta

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

disupervisi. Kesibukan kepala sekolah juga menyebabkan interaksi guru dan kepala sekolah menjadi tidak intensif sehingga pelaksanaan supervisi dalam meningkatkan kinerja mengajar guru dirasakan guru. Hal ini dipertegas oleh Bpk. Asep Mulyana kepala sekolah SMP Negeri 2 Kiarapedes yang diwawancarai penulis, bahwa kepala sekolah terlalu sibuk diluar mengurus banyak hal yang seperti rapat kepala sekolah, rapat biaya operasional sekolah, dan masalah administratif lain sehingga pembinaan dari kepala sekolah kepada guru-guru kurang yang mengakibatkan dalam satu tahun kepala sekolah hanya dapat mensupervisi 1-2 guru.

Rumusan masalah berhubungan dengan cakupan atau ruang lingkup masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini. Mohammad Ali (1987: 36) berpendapat bahwa “rumusan masalah pada hakekatnya merupakan generalisasi deskripsi ruang lingkup masalah penelitian dalam pembatasan dimensi variabel yang tercakup didalamnya.” Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran kemampuan supervisi kepala sekolah di SMP Negeri Se-Kabupaten Purwakarta?
2. Bagaimana gambaran kinerja mengajar guru di SMP Negeri Se-Kabupaten Purwakarta?
3. Seberapa besar kontribusi kemampuan supervisi kepala sekolah terhadap kinerja mengajar guru di SMP Negeri Se-Kabupaten Purwakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sasaran atau harapan yang akan dicapai dengan penyelenggaraan penelitian ini. Dengan kata lain bahwa tujuan penelitian merupakan arah yang akan dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang diharapkan terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus.

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai kontribusi kemampuan supervisi kepala

Herlina, 2013

Kontribusi Kemampuan Supervisi Kepala Sekolah terhadap Kinerja Mengajar Guru di SMP Negeri se-Kabupaten Purwakarta

sekolah terhadap kinerja mengajar guru di SMP Negeri Se-Kabupaten Purwakarta, melalui proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dengan cara atau prosedur tertentu.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran yang jelas mengenai kemampuan supervisi kepala sekolah di SMP Negeri Se-Kabupaten Purwakarta.
2. Untuk mengetahui gambaran yang jelas mengenai kinerja mengajar guru di SMP Negeri Se-Kabupaten Purwakarta.
3. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi kemampuan supervisi kepala sekolah terhadap kinerja mengajar guru di SMP Negeri Se-Kabupaten Purwakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu Administrasi Pendidikan khususnya mengenai kekepalasekolahan, supervisi dan keguruan.
2. Secara praktis, sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi peningkatan kemampuan supervisi kepala sekolah dan peningkatan kinerja mengajar guru di SMP Negeri Se-Kabupaten Purwakarta.

E. Struktur Organisasi Skripsi

Secara umum skripsi ini terdiri dari lembar pengesahaan skripsi, lembar pernyataan, abstrak, kata pengantar, ucapan terima kasih, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan lima bab inti serta lampiran pendukung, mulai dari pendahuluan pada bab satu sampai penutup pada bab lima dan lampiran pendukung, secara ringkas lima bab inti dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Herlina, 2013

Kontribusi Kemampuan Supervisi Kepala Sekolah terhadap Kinerja Mengajar Guru di SMP Negeri se-Kabupaten Purwakarta

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Dalam BAB ini, membahas mengenai latar belakang penelitian, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan penelitian baik tujuan secara umum maupun secara khusus, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis sampai pada struktur organisasi skripsi.

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS PENELITIAN

Dalam BAB ini, membahas mengenai kajian pustaka yang berisi teori dari berbagai ahli mengenai kemampuan kerja dan prestasi kerja, hubungan antara kemampuan kerja dan prestasi kerja kepala sekolah, kerangka pemikiran sampai pada hipotesis penelitian.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, membahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian, mulai dari lokasi penelitian, pendekatan yang digunakan, definisi operasional, instrumen, proses pengembangan instrumen, teknik pengumpulan data, sampai pada analisis data yang diperoleh.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, terdiri dari dua hal utama yaitu pengolahan atau analisis data untuk menghasilkan temuan berkaitan dengan masalah penelitian, pertanyaan penelitian, hipotesis, tujuan penelitian dan melakukan pembahasan atau analisis terhadap temuan tersebut.

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini, membahas mengenai kesimpulan dari penelitian dan juga saran yang diberikan mulai dari saran untuk lembaga sampai pada saran untuk peneliti selanjutnya.